

Islam Di Eropa: Mendayung di Antara Debat dan Negosiasi

M. Amin Nurdin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

amin.nurdin@uinjkt.ac.id

Abstract: *For 30 years the practice of multicultural ideology is a ‘success story’ in European migrant countries in managing multicultural societies, but in the last 10 years there has been a very heated debate among governments, politicians, and people who consider that this ideology has failed to unite (integration) immigrants, especially Muslim minorities in the mainstream of European way of life. The debate was triggered by the rise of the radical Islamic movement marked by the events of September 11, 2001 at the WTC New York, the bombing at the London Railway Station on July 7, 2005, a caricature of insulting Prophet Muhammad in Charlie Hebdo magazine in France, the Brussels case in 2016, terrorist attacks in Germany, and so on. The ideological failure factor is considered not only rooted in Western countries’ fear of the rise of militant groups that discredit the practice of multiculturalism, but also fosters Huntington’s thesis on the ‘clash of civilizations’ between Islam and the West. Islamic civilization is considered as an internal enemy against Western civilization (internal enemy). Whether we realize it or not, the above theory has a social political impact. This thesis has become a seed for the growth of the institutionalization of Islamophobia in the midst of society aimed directly at Muslims. To answer the above fear, the question arises, whether the application of the multiculturalism ideology will continue or return to the old concept of ‘monoculturaslime’ which is racist and conservative? In this case there are two opinions between rejecting and agreeing that need to be negotiated, in addition to the Muslims themselves seeking a form of Islam that is in accordance with European values (Euro-Islamic Norm) as is the case with the Archipelago Islam in Indonesia.*

Keywords: *Islamic, Islamophobia, European, Multiculturalism.*

Abstrak: *Selama 30 tahun praktik ideologi multikulturalisme merupakan ‘succes story’ di negara-negara migrant Eropa di dalam mengelola masyarakat multikultural, namun dalam 10 tahun terakhir timbul perdebatan yang sangat panas di antara pemerintah, politisi, dan masyarakat yang menganggap bahwa ideologi ini telah gagal mempersatukan (integrasi) kaum imigran, khususnya kaum minoritas Muslim dalam arus utama way of life masyarakat Eropa. Perdebatan tersebut dipicu oleh bangkitnya gerakan radikal Islam yang ditandai dengan peristiwa 11 September 2001 di WTC New York, pemboman di Stasiun Kereta api London tanggal 7 Juli 2005, kasus karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad di majalah Charlie Hebdo di Perancis, kasus Brussel di tahun 2016, serangan teroris di Jerman, dan lain sebagainya. Faktor kegagalan ideologi tersebut dianggap bukan saja berakar dari ketakutan negara-negara Barat terhadap kebangkitan kelompok militan yang mendiskreditkan praktik multikulturalisme, tetapi juga menyuburkan tesis Huntington tentang ‘clash of civilizations’ antara Islam dan Barat. Peradaban Islam dianggap sebagai musuh internal terhadap peradaban Barat (internal enemy). Disadari atau tidak, teori di atas mempunyai dampak sosial politik. Tesis ini telah menjadi benih tumbuhnya pelembagaan Islamophobia di*

tengah masyarakat yang ditujukan langsung kepada kaum Muslim. Untuk menjawab ketakutan tersebut di atas, timbul pertanyaan, apakah penerapan ideologi multikulturalisme tersebut akan tetap dilanjutkan atau kembali kepada konsep lama 'monokulturalisme' yang bersifat rasis dan konservatif? Dalam hal ini muncul dua pendapat antara menolak dan setuju yang perlu dinegosiasikan, di samping kaum Muslim itu sendiri mencari bentuk Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Eropa (*Euro-Islam Norm*) sebagaimana halnya Islam Nusantara di Indonesia.

Kata Kunci: *Islam, Islamophobia, Eropa, Multikulturalisme.*

Pendahuluan

Lebih dari lima dekade yang lalu, khususnya di tahun 1960-an kaum imigran Muslim dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika telah banyak menetap di kawasan Eropa yang pada umumnya menganut paham demokrasi liberal. Sampai hari ini, keberadaan mereka secara masif terus tumbuh berlipat ganda dibanding jumlah pendahulunya --kaum pendatang pertama-- sehingga menciptakan sebuah masyarakat multikultural di Eropa, yang sebelumnya hanya dihuni oleh masyarakat Kulit Putih.

Hasil studi yang dirilis awal Oktober 2009 menemukan bahwa Eropa memiliki sedikitnya 38 juta Muslim yang membentuk 5% dari total populasi benua tersebut. Sebagian besar terkonsentrasi di Eropa Barat, Tengah, dan Timur. Rusia memiliki lebih dari 20 juta Muslim, dan terbesar di Eropa. Menurut statistik terbaru (2011), jumlah mereka di Eropa Tengah, Utara, dan Barat sekarang sekitar 17 juta penduduk Muslim. Kaum Muslim terbanyak berada di Perancis sebanyak 4 sampai 6 juta orang, hampir 6% sampai 10% dari jumlah keseluruhan penduduk Perancis. Mereka kebanyakan berasal dari Afrika Utara, bekas koloni Perancis dan dari Turki. Penduduk terbanyak kedua adalah di Jerman dengan kisaran 3.8 sampai 4.3 juta orang dan estimasi 5.2% dari seluruh jumlah penduduk Jerman. Mayoritas Muslim di negara ini berasal dari Turki. Disusul peringkat ketiga di negara Inggris

berjumlah 2.7 juta imigran Muslim, hampir 5.6% dari seluruh penduduk Inggris yang berjumlah 56.1 juta. Umumnya mereka berasal dari Asia Selatan dan Afrika Timur, terutama Pakistan, Bangladesh, dan India. Disusul Negara Belanda yang memiliki hampir 1 juta orang setara 6% dengan dari penduduk Belanda. Umumnya mereka dari Turki dan Maroko. Di negara Spanyol berdiam 606.105 Muslim yang sebagian besar berasal dari Negara-negara Maghribi dan Sub-Sahara Afrika. Konsentrasi imigran Muslim lainnya terdapat di negara Italia, Belgia, Austria, dan Swiss.¹

Pada umumnya mereka datang dalam status pengungsi akibat perang saudara atau peminta suaka politik dan untuk mencari pekerjaan agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik karena negara-negara Barat tengah mengalami '*booming economy*' yang tengah memerlukan tenaga kasar dan murah. Secara sosio-kultural mereka datang dari daerah yang masih tradisional dan berpendidikan rendah, termasuk penghasilan. Rata-rata imigran Muslim di Eropa berdiam di kota-kota besar dan memiliki hambatan komunikasi, khususnya penguasaan bahasa asing di mana mereka bertempat tinggal.

¹Angel Rabasa dan Chryl Bernard, *Euro Jihad: Pattern of Islamic Radicalism and Terrorisms in Europe*, Cambridge University Press, New York, 2015, h. 9-18. Lihat juga Jorgen S. Nielsen, *Muslims in Western Europe*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004, 8.

Kedatangan para imigran Muslim ke Eropa yang begitu masif telah melahirkan suatu perubahan dalam komposisi etnis demografis, sosial, dan budaya serta sekaligus membentuk sebuah identitas nasional Eropa yang baru (*a new European national identity*). Sebagai konsekuensinya, muncul *masalah-masalah imigran* yang merupakan penduduk minoritas dengan perbedaan budaya yang mereka bawa dari negeri asal dengan prinsip-prinsip nilai budaya Barat berbasis tradisi Yahudi Kristen atau kebudayaan Eropa berikut identitasnya sebagai kelompok mayoritas.² Ada dua persoalan yang dihadapi negara-negara demokrasi liberal dalam hal ini; pertama, secara internal bagaimana menjaga integrasi sosial para imigran agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya dominan dan pandangan hidup di tempat mereka yang baru. Kedua, secara eksternal, bagaimana memelihara budaya asli (*cultural baggage*) dan identitas yang mereka bawa dari kampung halaman masing-masing.³

Dalam konteks integrasi sosial, respons negara-negara demokrasi liberal dalam mengelola realitas keragaman etnik-budaya penduduknya ini dilakukan melalui dua macam kebijakan ideologis, yaitu ideologi *assmilasi* dan *multikultural*.⁴ Ideologi asimilasi dibangun atas asumsi bahwa kaum migran akan bisa melepaskan cara hidup lama mereka dengan menyesuaikan diri pada

kerangka budaya dan gaya hidup Barat (*Western conformism*). Ideologi ini sangat Rasis dan diskriminatif terhadap segala akses sosial dan negara serta menjadi lahan subur tumbuhnya etnosentrisme, yang hanya meyakini validitas suatu sistem budaya. Sebaliknya, ideologi multikulturalisme merupakan lawan kata monokulturalisme yang menganut kesetaraan/keadilan kepada setiap individu dan kebudayaan.

Perdebatan Ideologi Multikulturalisme

Kritik terhadap ideologi asimilasi atau diskriminatif dimulai sekitar tahun 1950-an dan pada akhirnya lahir ideologi multikulturalisme setelah melalui perdebatan panjang antara akademisi dan elite pemerintahan tentang apa bentuk model masa depan ideologi negara. Ada yang berpendapat bahwa multikulturalisme dan etnisitas merupakan suatu ancaman bagi bangsa dan *way of life* Barat. Pendapat sebaliknya mengatakan, ideologi multikulturalisme dan etnisitas mampu memecahkan masalah hak-hak sosial, politik, dan ekonomi kelompok minoritas. Pendapat ini didukung oleh kelompok lain yang menyebutkan bahwa kekuatan identitas nasional bangsa yang rasis akan rapuh dengan berkembangnya multikulturalisme.⁵

Ideologi multikulturalisme pada umumnya dipraktikkan oleh masyarakat kontemporer yang bersifat multikultural. Paham ini menjadi modis (*fashionable*) dan secara luas diterima sebagai konsep sosial yang ideal dalam ideologi negara. Di negara-negara maju dan modern, seperti Eropa, Amerika Serikat dan Australia, multikulturalisme dianggap sebagai sebuah

²Eliezer Ben-Rafael, 'Multiculturalism in Sociological Perspective', in Rainer Baubock (ed.), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*, Avebury, England, 156. Lihat juga Bhiku Parekh, *European Liberalism and 'the Muslim Question'*. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008, 6.

³ Jean I. Martin, *The Migrant Presence: Australian Responses 1947-1977*, George Allen & Unwin, Sydney, 1978, 15-25.

⁴ James Jupp, 'Power in Ethnic Australia', in James Jupp (ed.), *Ethnic Politics in Australia*, George Allen & Unwin, Sydney, 1984, 184-185.

⁵Ellie Vasta, 'Multiculturalism and Ethnic Identity: Relationship between Racism and Resistance', dalam *Australian and New Zealand Journal of Sociology*, No.2, August 1993, 209-210.

taken for granted bagi ‘Dunia Baru’ menggantikan ‘Dunia Lama’ yang bersifat konservatif, Rasis dan fasis. Akibatnya, pandangan dunia terhadap nilai-nilai dan hegemoni juga ikut berbeda.⁶ Namun hal itu tidaklah mudah untuk disepakati, karena banyak penolakan dengan berbagai alasan, a.l.: *Pertama*, penolakan masyarakat kulit putih yang dominan enggan berbaur dan berbagi rasa dengan para migran, kelompok minoritas dan berkulit berwarna, yang datang membawa budaya mereka yang marginal dan bertentangan. *Kedua*, masyarakat kulit putih khawatir akan kehilangan kebanggaan identitas ras dan budaya superior dan disertai nasionalisme mereka yang obsesif.

Ideologi multikulturalisme kemudian memenangkan perdebatan. Multikulturalisme semakin berkembang dan diimplementasikan tahun 1970-an sebagai kebijakan politik publik di berbagai negara Eropa, meski berbeda dalam teknik penerapannya. Sejumlah faktor yang menyebabkan perubahan ideologis ini, antara lain (a). fluktuasi komposisi populasi kaum migran yang besar, (b). percepatan migrasi yang mengakibatkan membengkaknya arus imigran, dan (c). munculnya perubahan pandangan di pihak masyarakat kulit putih sendiri tentang kesetaraan dan keadilan bagi kelompok minoritas.⁷ Ini merupakan upaya domestikasi komunitas-sosial etnik yang beragam dan fluktuatif serta rawan konflik. Multikulturalisme membentuk sejarah baru dalam menerima kehadiran para pendatang.

⁶Eliezer Ben-Rafael, “Multiculturalism in Sociological Perspective”, in Rainer Baubock (ed.), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*, 143.

⁷The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australians: Our Developing Nationhood, Commonwealth of Australia, Canberra*, 1982, 12.

Sebelum ini, negara-negara Barat sampai tahun 1960-an masih melihat bahwa negara mereka merupakan suatu negara Kristen. Namun sejak meningkatnya eskalasi kesetaraan dan kebudayaan, persepsi ini berubah, tidak lagi mendasarkan diri pada satu agama, melainkan sebuah negara berlatar belakang multikultural. Karena itu negara-negara ini memiliki pluralitas keagamaan pula.

Kebijakan ini adalah suatu usaha rekayasa sosial politik (*social engineering*) dan manajemen konflik guna meredam ketegangan dan kekerasan dalam bentuk konflik budaya, terorisme, dan radikalisme. Dalam praktik multikulturalisme, diasumsikan kemungkinan konflik etnis sosial, budaya, dan agama di negara-negara Barat bisa mengecil.⁸ Berdasarkan pandangan inilah negara-negara Barat, seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belgia, dan Spanyol menjadikan ideologi multikulturalisme sebagai kebijakan politik negara.

Dalam konteks ini, misalnya penduduk negara Australia dan Kanada, yang ‘*migrant states*’ penuh sesak dan hiruk pikuk dengan berbagai latar belakang nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi acuan budaya. Secara sosiologis hal ini menjadi lahan subur aneka konflik dan kekerasan sebagai akibat heterogenitas sosial budaya, etnis, dan agama. Namun, di sinilah keunikan ideologi multikulturalisme. Kedua negara ini dapat menjadi contoh teladan yang terkenal ‘sunyi’ dari berbagai ragam konflik, apalagi konflik berbau keagamaan. Memadukan antara cerita keberhasilan dan kegagalan multikulturalisme sebagai ideologi bagaikan dua arus laut yang

⁸The Australian Council on Population and Ethnic Affairs, *Multiculturalism for All Australian*, 12.

harus diarungi dengan perahu dan dayung yang ampuh.

Multikulturalisme di Tahun 1990-an dan Islamophobia

Namun kondisi itu berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Dalam lima tahun terakhir ini, terjadi perdebatan yang semakin menghangat di negara-negara Barat bahwa ideologi multikulturalisme telah gagal mengintegrasikan kaum imigran, terutama kelompok Muslim dengan nilai-nilai Barat, sehingga perlu dikaji ulang.

Perdebatan tentang multikulturalisme sudah dimulai sejak peristiwa tragedi WTC New York 9/11. Disusul peristiwa bom di London, Stockholm, Paris, Brussels, dan di Jerman. Kasus demi kasus ini memunculkan sebuah pertanyaan tentang dimensi sosio-politik dan implikasi kehadiran serta kesepakatan dengan kaum Muslim di kalangan akademisi dan publik tentang kegagalan multikulturalisme. Kata kuncinya adalah *'Islamisme'* dan *'Fundamentalisme'*. Islam menjadi perdebatan hangat dalam konteks *'the Real Islam'* secara normatif di negara-negara Barat, a.l *'Islam and Secularism,' 'Islam and Democracy,' 'Islam and laicism,'* serta *'Islam and Modernity.'*⁹ Apakah Islam kompatibel dengan prinsip nilai-nilai demokrasi liberal? Bila sebelumnya kebijakan multikulturalisme (1970-an) disusun atas dasar pertimbangan politik dan budaya, sekarang berkembang menjadi persoalan politik agama atau agama dipolitisasi. Apakah kebijakan

multikulturalisme masih tetap harus dipertahankan?¹⁰

Kegagalan multikulturalisme tersebut juga dihantui oleh pengalaman buruk sejarah Eropa yang sangat mempengaruhi pandangan Barat tentang citra dunia Islam, seperti Perang Salib dan ekspansi Kesultanan Usmaniyah di Eropa. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa Eropa Barat melihat hal ini sebagai isu sensitif. Ditambah lagi, pengaruh trauma Barat terhadap peristiwa *'Thirty Years War'* pada abad ke-17 setelah post-Reformasi Eropa Barat antara Protestan dan Katolik. Pandangan penganut Protestan yang anti-Katolik muncul karena lembaga gereja dianggap tidak terbuka, otoriter, dan anti modernisasi. Bahkan penganut Katolik sebagai kelompok minoritas pada waktu itu juga dipersulit dalam hal imigrasi. Pengalaman buruk ini relevan dengan pandangan Barat terhadap Islam saat ini di Eropa. Akar persoalannya adalah konsep agama di Eropa Barat sejak abad ke-17 yang terlalu dipolitisasi.¹¹

Tidaklah mengherankan bila saat ini secara terang-terangan pemerintah Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, menganggap ideologi ini telah gagal, oleh karena itu mereka kembali kepada kebijakan yang lama, yaitu *asimilasi* dan *monokulturalisme*.¹² Hal serupa dikatakan oleh Kanselir Jerman dalam sebuah pidatonya, bahwa Jerman sama sekali gagal membangun sebuah masyarakat

⁹ Samuel M. Behloul, dkk. (ed.), *Debating Islam: Negotiating Religion, Europe, and the Self*, Deutsche Nationalbibliothek, Germany, 2015, 11.

¹⁰ Tariq Moqdood, *Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series*, Polity Press, England, 2007, 1.

¹¹ Samuel M. Behloul, dkk. (ed.), *Debating Islam: Negotiating Religion, Europe, and the Self*, 17-18.

¹² Degradasi multikulturalisme ke arah asimilasi juga telah diramalkan seorang tokoh Islam Inggris Tahir Abbas. Baca Tahir Abbas, *Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience*, International Seminar paper, Muhammadiyah dan British Council, Jakarta, 30 Januari, 2006, 26.

multikultural. Konsep multikulturalisme dengan tujuan masyarakat yang berdampingan secara rukun tidak bekerja sepenuhnya. Ia melihat secara spesifik, Islam dan kelompok Muslim sebagai warga pendatang dari Turki dan negara-negara Arab sangat sulit membaaur dengan nilai-nilai Barat, khususnya Jerman. Perdana Menteri (PM) Inggris David Cameron (Feb.5, 2011), sependapat, ketika ia mengatakan negara multikulturalisme telah gagal dan menghimbau pemerintah untuk mewaspadai radikalisme di kalangan pemuda. Disusul pendapat serupa oleh Perancis dan Spanyol.

Pemerintah dan politisi Eropa menegaskan kegagalan multikulturalisme disebabkan oleh kegagalan kelompok Muslim di Eropa menyesuaikan diri dengan peradaban Eropa. Persepsi ini kemudian memunculkan sentimen yang berbau Rasis, yaitu islamophobia. Islamophobia adalah suatu sikap permusuhan atau kebencian terhadap Islam. Sikap islamophobia di Eropa tampak pada Partai *British National Party* (BNP) di Inggris, yang menggunakan isu tersebut sebagai kampanye politik. Di Belanda, Geert Wilders juga menggunakan cara seperti ini dalam pemilihan anggota parlemen bagi partainya, *Party For Freedom* (PVV), atau *Partij voor de Vrijheid*. Begitu pula di negara tetangganya, Belgia dan Swedia, juga menampilkan gejala serupa. Kampanye partai politik mengatasnamakan gerakan *populis* saat ini sangat laku 'dijual' meski bertentangan dengan nilai demokrasi. Sikap kebencian dan permusuhan terhadap agama Islam secara definitif mengalami perubahan dari bersifat biologis atau psikologis menjelma menjadi anti Islam, yang dikenal

dengan istilah rasisme kebudayaan (*cultural racism*).¹³

Menurut Gabriele Marranci, kegagalan multikulturalisme di negara-negara Eropa bukan hanya berakar pada rasa ketakutan Barat terhadap Islam --gagasan islamisasi Eropa-- tetapi juga muncul dari rasa ketakutan terhadap ideologi multikulturalisme itu sendiri dengan segala konsekuensinya. Masyarakat Barat menganggap kelompok Muslim bukan hanya sebagai 'orang asing' (*aliens*), tetapi juga berbahaya, karena itu tidak cocok duduk bersanding dengan tradisi Barat. Munculnya sikap stereotip dan *labelling* (*cap*) yang mengandung kebencian dan permusuhan terhadap Islam merupakan sikap yang rasistis. Stereotip ini menyebar ke seluruh masyarakat Eropa melalui media massa dan dipolitisir oleh para politisi, yang tidak mewakili gambaran sebenarnya dunia Islam dan gaya hidup mereka sebagai 'orang asing' bagi nilai-nilai Barat.¹⁴

Kebencian terhadap Islam, di satu sisi tidak hanya mendiskreditkan multikulturalisme, tetapi di sisi lain juga menumbuhkan-kembangkan tesis Huntington '*clash of civilizations*' antara Barat dan Islam (1996). Peradaban Islam dianggap sebagai '*musuh dalam selimut*' bagi peradaban Barat. Isu ini kemudian menjadi bagian dari isu sentral di abad ke-21, khususnya di negara-negara Barat.¹⁵

¹³ Dr. Can Erimtan, *Today's Zaman*, Nov. 23. 2010, Istanbul.

¹⁴ Gabriele Marranci, 'Multiculturalism, 'Islam and the Clash of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia', dalam *Culture and Religion*, Vol. 5, No. 1, Routledge, New York, 2004, 105.

¹⁵ Ibrahim Kalin, 'Islamophobia and the Limits of Multiculturalism', dalam John L. Esposito and Ibrahim Kalin (ed.), *The Challenge of Pluralism in the 21st Century: Islamophobia*, Oxford University Press, New York, 2011, 3.

Senada dengan itu, teori Huntington ‘*clash of civilizations*’ antara Barat dan Islam telah menjadi inspirasi islamophobia oleh banyak tokoh-tokoh pemerintah, seperti Donald Rumsfeld, Vladimir Putin dan Silvio Berlusconi dalam mengambil kebijakan pemerintah.¹⁶ Ketakutan Barat ini sebenarnya sudah diprediksi Huntington dan disadari atau tidak, teori ini mempunyai efek politik dan sosial. Teori ini menjadi bibit munculnya pelembagaan islamophobia di tengah masyarakat Eropa (*institutionalized islamophobia*) diikuti diskriminasi dalam undang-undang oleh lembaga-lembaga pemerintah yang sebenarnya ditujukan kepada kelompok Muslim.¹⁷

Di sini terlihat adanya paradoks terhadap multikulturalisme itu sendiri. Di satu pihak, kelompok minoritas perlu diakomodasi dalam suatu proses integrasi sosial, tetapi di lain pihak, ideologi sekularisme Barat berikut lembaga-lembaganya justru menjadi penghambat akomodasi kaum Muslim. Pemerintah Inggris memberlakukan undang-undang pembatasan kaum Muslim sebagai kelompok dalam *the Race Relations Act* tahun 1976, meskipun mereka lahir di negara tersebut. Begitu pula undang-undang Perancis yang melarang pemakaian cadar/burqa, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai supremasi dan *mainstream* Barat. Unsur budaya dan agama merupakan faktor yang signifikan dalam mengembangkan islamophobia. Karena itu secara langsung atau tidak telah terjadi pelembagaan

islamophobia di tengah masyarakat Eropa (*institutionalized islamophobia*).¹⁸

Selain itu, faktor krisis ekonomi sejak tahun 2008 yang dialami Barat dan Amerika Serikat akhir-akhir ini juga menjadi alasan utama penolakan multikulturalisme. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan semakin tingginya tingkat pengangguran dan kriminalitas, serta semakin meningkat pula sikap anti imigran dan anti Muslim terhadap warga pendatang. Biaya penerapan multikulturalisme memang mahal.¹⁹ Dalam kasus Jerman, pemerintah kota dan negara bagian harus menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi imigran yang berasal dari Suriah; termasuk misalnya biaya penguasaan Bahasa Jerman di tempat-tempat kursus dan brosur-brosur yang diterbitkan pemerintah. Demikian pula di negara seperti di Amerika Serikat.

Negosiasi Islam terhadap Barat

Pada awalnya pelaksanaan ideologi multikulturalisme dianggap sebagai sebuah tipe ideal yang berhasil mengelola berbagai perbedaan kultural yang dicirikan dengan rendahnya tingkat kekerasan dalam politik, etnik, dan keagamaan, termasuk terorisme. Dampaknya muncul dalam bentuk pertumbuhan pesat etnis imigran dan komunitas keagamaan, khususnya komunitas Muslim. Warisan budaya mereka dilindungi agar ‘integrasi dan harmoni’ antara pendatang tuan rumah. Ideologi multikulturalisme merupakan hadiah paling besar bagi kaum minoritas yang hidup di negara-negara Barat, khususnya kaum Muslim. Negara-negara Barat dengan segala perjuangan mencabut ‘Kebijakan Kulit

¹⁶ Islamophobia in Britain: <http://www.newstatesman.co.uk/>

¹⁷ Gabriele Marranci, ‘Multiculturalism, Islam and the Clash of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia’, 110.

¹⁸ Gabriele Marranci, ‘Multiculturalism, Islam and the Clash of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia’, 108.

¹⁹ Stephen J. Rimmer, *The Cost of Multiculturalism*, Belcomen, Bedford Park, 1991, 11.

Putih' (*White Policy*) dan menggantinya dengan sebuah paradigma baru, yaitu, multikulturalisme. Dengan paradigma baru ini, terbitlah sebuah era baru dan kaum minoritas merasa bahwa sekarang mereka memperoleh kehidupan yang adil dan setara. 'Kita sekarang adalah multikulturalis' ... 'We are all multiculturalists now'.

Namun, ternyata hal itu tidak terjadi, karena ada beberapa masalah yang dihadapi negara-negara Eropa pada umumnya terhadap keberadaan kaum minoritas Muslim, yaitu: *budaya, identitas, dan kesetiaan* (loyalitas).²⁰ Budaya merupakan ekspresi agama meskipun agama tidak sama dengan budaya. Secara budaya, generasi pertama kaum pendatang masih tetap terikat dengan budaya agama asli mereka yang banyak berlawanan dengan penduduk pribumi Eropa. Namun demikian budaya tersebut belum tentu menceminkan ajaran agama yang sebenarnya (*Islam otentik*). Generasi kedua dan seterusnya mencoba membentuk identitas dan budaya yang baru di tempat mereka dilahirkan. Praktek agama dan budaya menemui perbedaan-perbedaan dengan orang tua mereka. Persoalan identitas kerap menjadi kendala tatkala berhadapan dengan budaya Eropa. Identitas budaya adalah suatu masalah yang tidak monolitik dan bukan satu-satunya faktor yang bisa menegaskan pihak lain. Inilah dilema yang dihadapi generasi baru imigran. Identitas dapat mengalami sebuah transformasi terkait dengan tantangan-tantangan yang tengah dihadapinya kini. Demikian pula persoalan hambatan loyalitas,

umumnya kaum pendatang yang telah menjadi warganegara dan yang belum mempunyai tingkat loyalitas (nasionalisme) yang dianggap rendah. Loyalitas kaum muslim lebih tinggi kepada *International Ummah* daripada Eropa itu sendiri.

Islam sebagai sebuah agama pada hakekatnya memiliki peradaban nilai-nilai universal sejalan dengan inti peradaban nilai-nilai Barat, seperti keadilan, HAM, demokrasi, kebebasan beragama, toleransi, dan lain-lain, yang bisa menjadi '*shared values*', bukan sebuah pertentangan (kontradiksi). Dengan demikian, sebagai pendatang baru, kaum Muslim tidak hanya diberi mandat untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan pada masyarakat Eropa, tetapi juga untuk berbagi dan bertanggungjawab sebagai warganegara penuh atau penempat agar dapat berintegrasi dengan perundangan yang berlaku di negara tempat mereka menetap.

Untuk itu, masyarakat Muslim perlu menginterpretasi ulang pemahaman teologis mereka dari sumber-sumber Islam yang otentik: *Qur'an* dan *Sunnah*. Suatu penyegaran kembali atas prinsip-prinsip dasar ajaran Islam akan mampu menciptakan identitas baru sebagai seorang Muslim Eropa.²¹ Isu-isu teologis dan perundang-undangan Islam yang terkait dengan masalah identitas Muslim Eropa antara lain:

1. Isu *dār al-Islām* versus *dār al-ḥarb* masih menghantui pemikiran kaum Muslim Eropa.
2. Pemahaman teks dan sumber prinsip-prinsip dasar dan kontekstual khususnya yang terkait dengan identitas Muslim Eropa.

²⁰M. Faisal Karim, 'Proses Munculnya Euro-Islam sebagai Transnasional Norms di Kalangan Muslim Eropa', dalam *Jurnal Kajian Wilayah*, vol. 1 no. 1, LIPI, 2010, h. 51. Lihat juga Tariq Ramadan, *To be a European Muslim: A Study Islamic Source in the European Context*, alihbahasa Abdullah Ali, Mizan, 2002, 168.

²¹ Tariq Ramadan, *To be a European Muslim: A Study Islamic Source in the European Context*, 22.

3. Pemahaman dan aplikasi tata peradilan Islam (*Uṣūl al-Fiqh*).
4. Konsep Islam sebagai sebuah agama universal.
5. Isu-isu agama dan ijtihad

Pembaruan teologis yang dilakukan adalah bercorak rasional dan bertujuan untuk membangun sebuah norma baru di Eropa yang memungkinkan kaum Muslim berintegrasi dengan masyarakat Eropa. Norma baru tersebut disebut *Euro-Islam*. Ide ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam dan Eropa memiliki peradaban dan bersumber dari ajaran yang sama (agama Ibrahim). Meskipun *Euro-Islam* merupakan sebuah konsep yang menawarkan suatu pemahaman baru dengan cara yang lebih rasional dan literal terhadap Islam, ia diharapkan dapat diterima sebagai solusi dan negosiasi oleh kaum Muslim maupun masyarakat Eropa. Kaum Muslim diminta dapat menerima gagasan-gagasan Eropa tentang sekularitas, toleransi, pluralisme, dan individualisme.²²

Konsep Euro-Islam pertama kali diperkenalkan oleh Bassam Tibi tahun 1992 dan kemudian berkembang menjadi fokus debat yang cukup tajam. Tariq Ramadan, seorang teolog Perancis dan filsuf keturunan Mesir menjadi juru bicara Euro-Islam, meskipun pada awalnya masih berupa sebuah wacana, namun kemudian menjadi sebuah perdebatan. Ide ini berkembang terus sampai saat ini. Norma ini mencoba merubah sebuah identitas Islam baru bagi kaum Muslim di Eropa agar dapat menjadi sebuah solusi masalah identitas. Ada beberapa upaya dialog peradaban dengan Eropa agar identitas Eropa dapat diterima sebagai solusi dalam

permasalahan identitas Islam di Eropa. Dialog-dialog dan seminar yang diadakan oleh Tariq Ramadan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran identitas Euro-Islam. Suatu ketika Ramadan berkata: ‘...tantangan hari ini adalah bagaimana membuat kaum Muslim memahamai bahwa anda tak perlu menjadi kurang Muslim untuk menjadi lebih Eropa... Anda bisa jadi keduanya’.

Di samping upaya Tariq Ramadan, ada juga upaya lainnya, seperti penciptaan sebuah proyek Euro-Islam sebagai suatu cara pembuktian konsep Euro-Islam pada semua orang Muslim di Eropa. Dengan bangkitnya Euro-Islam pada tataran wacana, setidaknya ada dasar pembentukan untuk men-ciptakan integrasi antara masyarakat Eropa dan kaum Muslim di seluruh dunia Eropa. Konsep Euro-Islam sendiri pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi dasar pembentukan identitas Muslim Eropa, tetapi juga menjadi instrumen dialog peradaban di antara keduanya, tanpa adanya sikap prasangka (*prejudice*).²³ Berbagai upaya menuju ujung kesepakatan Euro-Islam di tengah rintangan di atas, menimbulkan rasa bagai ‘mendayung di antara debat dan negosiasi’. Dalam alegori legenda Jerman kuno situasi ini diibaratkan bagaikan sebuah ‘navigasi antara *Scylla and Charibdys*’...

Multikulturalisme Indonesia dan Kerukunan

Dalam sejarah Indonesia, ketegangan dan konflik etnis, agama, budaya, dan politik telah menjadi bagian dari potret interaksi masyarakat. Sejak menjelang kemerdekaan hingga era reformasi, masalah ini tidak pernah terselesaikan. Perbedaan primordial sering menjelma menjadi pertentangan, sehingga

²² Bassam Tibi, ‘Muslim Migrants in Europe: Between Euro-Islam and Ghettonization’, in Nezar Alsayyad dan Manuel Castells (ed.), *Muslim-Euro or Euro-Islam*, Lexington Books, Boston, 2002, 17.

²³ Tariq Ramadan, *To be a European Muslim: A Study Islamic Source in the European Context*, 192.

pada gilirannya melahirkan ketidaknyamanan hidup bersama. Pergantian rezim sekan tidak berarti pergantian mental dan budaya konflik dan kekerasan. Sementara masyarakat tidak juga merasa menjadi bagian dari upaya menciptakan kehidupan harmonis dalam perbedaan itu.

Tidak hanya kekerasan dan konflik horizontal semacam itu. Kekerasan struktural (*state violence*) yang dilakukan negara (pemerintah) yang bentuk puncaknya adalah *state terrorism* terus memperumit masalah interaksi horizontal. Masyarakat yang cenderung tidak menghargai perbedaan sering kali dipengaruhi oleh kekerasan-kekerasan pemerintah dan aparaturnya, selain tentu saja kelompok elite serta tokoh-tokoh politik dan agama. Politik pemerintah yang tidak demokratis atau diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat baik yang bersifat keagamaan, budaya, etnik, maupun politik, secara tak terasa menjadi pembenaran tindakan-tindakan serupa pada akar rumput, yang berbentuk anarkisme atau bahkan terorisme.

Ide Persatuan nasional, meski sering sangat efektif untuk meredam keinginan berpisah dan bercerai atau sekedar berontak, ternyata bagi banyak kelompok masyarakat berfungsi sekedar untuk menakut-nakuti. Harapan sebagian besar masyarakat untuk dihargai identitas, agama, etnis, kelompok politiknya tidak kunjung dipenuhi, yang ada hanya dengan slogan "Persatuan Nasional". Slogan lain *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tapi tetap satu telah kehilangan daya gebrak tentang pentingnya hidup bersama dalam perbedaan. *Tunggal Ika* lebih ditekankan ketimbang *Bhinneka*, sehingga akhirnya melahirkan persatuan semu (*psedo-unity*). Dengan kata lain, *Bhinneka Tunggal Ika* belum mampu secara efektif mengakomodir

perbedaan masyarakat Indonesia. Hal ini juga terlihat pada prinsip monokulturalisme yang cenderung digunakan pada rezim Soeharto terlihat kurang menghargai kebinekaan, tetapi lebih mementingkan *Tunggal Ika*. Di sini, barangkali perlu pelurusan pengertian atau penerjemahan istilah warisan budaya ini dengan mempertimbangkan sebuah kebijakan multikulturalisme untuk menata ulang pengelolaan keragaman budaya (*managing cultural diversity*) untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dan negara.

Masalah yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk (*plural*) terpusat pada aspek hubungan antara pihak pemerintah atau sistem nasional dan kelompok etnik. Pemerintah dalam hal ini, sejak rezim Soekarno hingga Jokowi belum membangun sebuah kebijakan nasional yang bersifat strategis. Masing-masing mempunyai kebijakan sendiri-sendiri di dalam pengelolaan keberagaman. Soekarno, misalnya, menggunakan kebijakan *amalgamasi*. Soeharto, seperti dijelaskan di atas, sementara Habibie terjebak antara ide demokrasi dan pengaruh despotis Suharto dan pendekatan militer. Namun pada masa Gus Dur, ide multikulturalisme mulai menampakkan diri.

Sama halnya dengan negara demokrasi liberal, konflik etnis di Indonesia bermuara pada konflik etnik lokal dengan etnik pendatang. Pengaruh konflik tersebut mengakibatkan hilangnya kehidupan masyarakat dan hancurnya ekonomi dan lingkungan etnik pendatang serta pengusiran dari tempat tinggal yang selama ini mereka huni. Pada umumnya faktor disintegrasi tersebut disebabkan oleh persaingan sumber-sumber ekonomi, posisi, dan kekuasaan, yang kemudian sering bergeser menjadi konflik keagamaan. Masalah yang juga mengemuka

akhir-akhir ini, khususnya Pilkada DKI adalah persoalan toleransi di kalangan umat antar-agama. Di sini ada relevansi kasus di Negara Barat dengan Indonesia, yaitu politisasi agama. Karena itu perlu penyegaran kembali ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan Nurcholish Madjid dulu.

Di samping itu, perlu ada kebijakan multikulturalisme sebagai kebijakan politik negara dalam rangka pembentukan masyarakat multikultural yang sehat. Namun hal ini tidak bisa dilakukan secara *taken for granted* dan *trial and error*, sebaliknya diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated*, dan berkesinambungan. Beberapa langkah yang paling strategis untuk mengelola kera-gaman, tidak hanya menyangkut persoalan agama, tetapi sekaligus etnik. Langkah strategis lainnya adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat luas seperti yang diusulkan cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra. Tahap pertama bentuk pendidikan ini bisa dalam bentuk pendidikan interkultural sebagai wujud *cross-cultural* untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda. Pada tahap ini, pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan budaya atau kelompok lain, khususnya kalangan minoritas. Selain itu juga ditujukan untuk timbulnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain. Tahap berikutnya ditujukan pada bagaimana mengelola dan memelihara serta memperkaya warisan kultural yang terdapat dalam masyarakat sehingga masing-masing

kelompok bisa saling berbagi (*sharing*) dan saling memiliki.

Kesimpulan

Kaum Muslim minoritas sekarang dianggap sebagai kelompok yang memiliki potensi ancaman bagi keberlangsungan hegemoni Barat. Karena itu, apakah ideologi multikulturalisme akan tetap dilanjutkan? Diperlukan re-evaluasi antara yang menolak dan setuju untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat yang dihuni tidak hanya penduduk kaum Kulit Putih, tetapi juga penduduk imigran dengan kulit berwarna dengan latar belakang sosial budaya yang penuh warna-warni. Penduduk Eropa juga perlu memahami Islam yang sebenarnya dan sebagai bagian dari multikulturalisme Eropa di mana secara historis persinggungan peradaban Islam dan Eropa telah berlangsung ribuan tahun silam. Islam tidak lagi dipahami sebagai peradaban asing dan diposisikan sebagai antitesis dari Barat. *“They're there [in Europe] but not there.”*

Negara-negara Barat perlu mendefinisikan kembali kebijakan ideologi multikulturalisme dengan memperbaiki peraturan-peraturan yang menghambat tujuan ideologi tersebut (*integrasi*). Namun di samping itu, kaum Muslim juga harus membangun identitas baru sebagai kaum Muslim Eropa (*Euro-Islam*) sehingga *‘clash civilization’* tidak berlanjut di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abbas, Tahir, *Religion, Radicalism and Multiculturalism: Indonesia and UK Experience*, International Seminar Paper, Muhammadiyah dan British Council, 30 Januari, Jakarta, 2006.
- Advisory Council on Multicultural Affairs, *Towards a National Agenda for a*

- multicultural Australia: A Discussion Paper*, Commonwealth of Australia, Canberra, 1988.
- Bassam Tibi, 'Muslim Migrants in Europe: Between Euro-Islam and Ghettonization', in Nezar Alsayyad dan Manuel Castells (ed.), *Muslim-Euro or Euro-Islam*, Lexington Books, Boston, 2002.
- Baubock, Reiner et al (eds.), *The Challenge of Diversity: Integration and Pluralism in Societies of Immigration*, Avebury, Vermont, 1996.
- Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.), *Muslim in the West*, Oxford University Press, London, 2002
- Jupp, James, 'Power in Ethnic Australia', in James jupp (ed.), *Ethnic Politics in Australia*, George Allen & Unwin, Sydney, 1984,
- Kalin, Ibrahim, 'Islamophobia and the Limits of Multiculturalism', dalam John L. Esposito and Ibrahim Kalin (ed.), *The Challenge of Pluralism in the 21st Century: Islamophobia*, Oxford University Press, New York, 2011
- Marranci, Gabriele, 'Multiculturalism, 'Islam and the Class of Civilisations Theory: Rethinking Islamophobia', dalam *Culture and Religion*, Vol. 5, No. 1, Routledge, New York, 2004
- Moqdood, Tariq, *Multiculturalism: Themes for Twenty Centuries Series*, Polity Press, England, 2007,
- Nielsen, Jorgen S. *Muslims in Western Europe*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004.
- Parekh, Bhikhu, *European Liberalism and 'the Muslim Question'*. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2008.
- Rabasa, Rabasa dan Chryl Bernard, *Euro Jihad: Pattern of Islamic Radicalism and Terrorism in Europe*, Cambridge University Press, New York, 2015.
- Rimmer J. Stephen, *The Cost of Multiculturalism*, Belcomen, Bedford Park, 1991.
- Tariq Ramadan, *To be a European Muslim: A Study Islamic Source in the European Context*, alihbahasa Abdullah Ali, Mizan, 2002.